

- 1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.** Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa pada Triwulan IV relatif stabil atau bahkan turun. Berdasarkan data perkembangan IPH pada bulan Oktober terjadi deflasi tertinggi pada Minggu Keempat sebesar -0,65 dengan komoditas andil cabai rawit, cabai merah dan gula pasir. Deflasi tertinggi pada November terjadi pada Minggu Keempat sebesar -2,03 dengan komoditas andil daging sapi, cabai rawit dan beras. Selanjutnya pada Desember terjadi deflasi tertinggi pada Minggu Pertama sebesar -1,78 dengan komoditas andil beras, minyak goreng dan cabai rawit. Harga rata-rata komoditas pada Triwulan IV tampak pada tabel berikut:

NO. KOMODITAS	Oktober	November	Desember
1 Beras Premium	15.200	15.000	15.000
2 Beras Medium	14.000	13.000	13.000
3 Kedelai Biji Kering (Impor)	11.286	11.000	11.000
4 Bawang Merah	25.914	36.214	39.857
5 Bawang Putih Bonggol	38.057	38.429	40.000
6 Cabai Merah Keriting	22.171	19.571	27.857
7 Cabai Rawit Merah	47.357	38.964	40.000
8 Daging Sapi Murni	150.000	150.000	150.000
9 Daging Ayam Ras	35.000	35.000	35.000
10 Telur Ayam Ras	28.000	28.000	28.000
11 Gula Konsumsi	18.000	18.000	18.000
12 Minyak Goreng Kemasan Sederhana	16.233	16.125	16.104
13 Tepung Terigu (Curah)	12.000	12.000	12.000
14 Minyak Goreng Curah	14.000	14.000	14.000
15 Ikan Kembung	48.029	46.714	49.286
16 Ikan Tongkol	29.571	29.893	30.536
17 Garam Halus Beryodium	15.000	15.000	15.000
18 Tepung Terigu Kemasan	13.000	13.000	13.000
19 Beras SPHP	12.500	12.500	12.500

- 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.**

Pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Barat merupakan tantangan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut beberapa permasalahan utama dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Barat antara lain:

1. Ketergantungan pada Pasokan Luar Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang bukan sentra produksi pangan atau industri, masih bergantung pada pasokan dari luar. Ketika distribusi terganggu (misalnya karena cuaca, bencana alam, atau kebijakan perdagangan), maka harga barang pasti melonjak.
2. Infrastruktur Distribusi yang Terbatas Kurangnya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan gudang penyimpanan dapat menyebabkan keterlambatan distribusi dan meningkatkan biaya logistik, hingga pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang. Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah rawan bencana, seperti longsor, banjir dan gempa bumi yang dapat menghambat distribusi bahan pangan dari luar daerah.
3. Volatilitas Harga Pangan dan Energi Harga pangan dan energi sangat berpengaruh pada inflasi daerah. Gangguan produksi pertanian akibat perubahan iklim atau kenaikan

harga bahan bakar dapat langsung berdampak pada harga bahan pangan.

4. Momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Inflasi sering kali meningkat pada momen tertentu, seperti menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri atau Natal serta musim panen yang buruk. Selain itu, spekulasi dari pedagang dan tengkulak dapat memperburuk kenaikan harga.

3. **Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.** Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dibentuk untuk mengoordinasikan berbagai kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah. TPID bertugas untuk: 1. Melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. 2. Menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi. 3. Berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Barat mengacu pada Strategi 4K yang dicanangkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat, yaitu: 1. Keterjangkauan Harga

- a. Operasi pasar murah atau Gerakan Pangan Murah untuk mengendalikan lonjakan harga bahan pokok;
- b. Penyediaan informasi harga pangan secara transparan untuk mencegah spekulasi pasar.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Meningkatkan produksi komoditas utama melalui program pertanian dan peternakan melalui Program PESPA ANTIK(**PEKARANGAN SUMBER PANGAN ANTISIPASI INFLASI NAIK**);
- b. Menjalin kerja sama antar daerah (KAD) dalam distribusi pangan guna mengurangi ketergantungan pada pasokan luar.
- c. Membangun dan memperkuat cadangan pangan daerah.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan sistem logistik untuk menekan biaya distribusi.
- b. Penghapusan hambatan distribusi, seperti pungutan liar atau perizinan yang berbelit.

4. Komunikasi Efektif

- a. Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang kebijakan pengendalian inflasi.
- b. Penyampaian informasi harga dan stok barang secara berkala untuk menghindari kepanikan pasar melalui website Pemkab Pesisir Barat.

4. **Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.** Evaluasi kebijakan inflasi di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat dari pelaksanaan strategi 4K berikut: 1. Keterjangkauan Harga Daya beli masyarakat masih terjaga, karena harga masih relatif stabil. Didukung dengan pelaksanaan Operasi Pasar atau Gerakan Pangan Murah. 2. Ketersediaan Pasokan Pasokan atau stok bahan kebutuhan pokok pada Triwulan IV masih aman dan tidak terjadi kelangkaan barang. 3. Kelancaran Distribusi Distribusi bahan pangan dari luar daerah relatif aman, meski terkadang terdapat longor di beberapa titik jalan Lampung Barat - Pesisir Barat dan Tanggamus - Pesisir Barat. 4. Komunikasi Efektif TPID Kabupaten Pesisir Barat selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait upaya pengendalian inflasi daerah dan menyebarluaskan perkembangan harga bahan pangan kepada masyarakat melalui website.

5. **Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.** Pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Barat memerlukan kombinasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang melibatkan berbagai sektor. Rekomendasi kebijakan meliputi: 1. Penguatan produksi dan ketahanan pangan lokal; 2. Optimalisasi peran TPID dan pemanfaatan teknologi; 3. Peningkatan efisiensi distribusi dan kerja sama antar daerah; 4. Intervensi pasar yang lebih terarah dan berkelanjutan; 5. Transparansi informasi dan edukasi masyarakat.